

## Unimal Progresif Memberlakukan Kurikulum Merdeka



Universitas Malikussaleh menggelar workshop tentang pengembangan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka selama dua hari di Banda Aceh, 7-8 Desember 2020. Foto: Bustami Ibrahim.













SEJAK Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, Universitas Malikussaleh langsung berbenah dengan melakukan sejumlah penyesuaian. Setelah melalui serangkaian lokakarya dan seminar, selain diskusi-diskusi di luar forum resmi, akhirnya Unimal memberlakukan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada semester ganjil 2020/2021.

Tentunya tidak semua berjalan lancar sebagaimana yang termaktub dalam panduan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Setidaknya begitulah yang tergambar dalam Workshop Pengembangan Kurikulum Merdeka di Banda Aceh, 7 Desember 2020. Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring tersebut diikuti seluruh pimpinan, para dekan, dan ketua program studi di lingkungan Universitas Malikussaleh.

Dosen Institut Pertanian Bogor, Dr Alim Setiawan Slamet, yang menjadi pemateri menyebutkan pada prinsipnya pemberlakuan Kurikulum Merdeka memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dan minat dalam bidang tertentu. Kurikulum tersebut disusun untuk menyiapkan mahasiswa mampu berenang di tengah samudra, sebagaimana yang sering ditamsilkan Mas Menteri Nadiem Anwar.

“Kurikulum harus menggambarkan standar capaian. Dalam prosesnya bisa menggambarkan Tri Darma Perguruan Tinggi. Di dalamnya bisa mendukung peningkatanskill mahasiswa yang sangat dibutuhkan pada kondisi saat ini,” jelas Alim Setiawan yang menyampaikan materi secara daring.

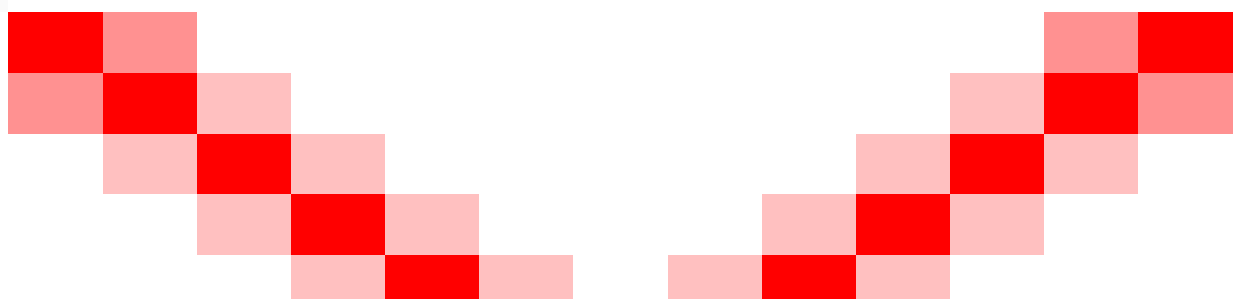
Untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka, peran dosen sangat menentukan. Kurikulum disusun secara fleksibel, mengadaptasi perubahan, paradigma baru, dan secara periodik harus diaudit. Kurikulum Merdeka juga menuntut adanya multidisiplin, mampu memecahkan masalah secara kompleks, penguasaan bahasa asing, materi dan media belajar yang terbuka, serta mampu menggunakan teknologi digital.

“Kurikulum juga harus mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam berbagai bidang. Kurikulum juga mempertimbangkan visi misi dari perguruan tinggi dan sinyal-sinyal perubahan ke depan,” jelas Alim Setiawan yang sudah beberapa kali menjadi pemateri dalam tema MBKM di Universitas Malikussaleh.

Alim Setiawan mengapresiasi Universitas Malikussaleh yang menurutnya progresif dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka. Ia mengingatkan hasil pemberlakuan MBKM tersebut dievaluasi secara berkala dan terbuka dengan berbagai perubahan, termasuk dalam bidang teknologi.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Teuku Kemal Fasya, secara kritis mempertanyakan aspek filosofis MBKM apakah telah mempertimbangkan dimensi filosofis dari Undang-Undang Sisdiknas terkait adanya pemerataan pendidikan dan hadirnya proses pendidikan yang efektif dan efisien. Termasuk juga dikontraskan dengan UU Pendidikan Tinggi tentang tujuan pendidikan yaitu pembudayaan dan tertanamnya nilai-nilai humaniora dalam proses pendidikan.

"Karena secara praksis model KMMB (Kurikulum Merdeka Belajar) ini desainnya terlihat sangat neoliberalistik dan mengakomodasi sistem permagangan yang ada di fakultas eksakta. Kurikulum Merdeka seolah hanya fokus pada bidang eksakta saja dan tidak cocok untuk sistem pendidikan sosial humaniora," paparnya. Teuku Kemal Fasya juga mengingatkan agar tidak terburu-buru menerapkan kurikulum MBKM sehingga mengabaikan berbagai keterbatasan yang ada, baik pada dosen, mahasiswa, maupun lingkungan.





**Tanggal:** 09 December 2020

**Post by:** [ayi](#)

**Kategori:** [Feature](#),

**Tags:** [Unimal](#), [Aceh](#), [Unimal Hebat](#), [Pelatihan](#),